

Peran strategic thinking dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan mewujudkan kesejahteraan nasional sesuai amanat UUD 1945

The role of strategic thinking in maintaining regional security stability and achieving national welfare in accordance with the mandate of the 1945 Constitution

Roedy*, Bambang Irwanto, Robby Mochamad Taufik

*Corresponding author, Email: rroemin@gmail.com

Universitas Pertahanan, Jl. Salemba Raya No 14, Jakarta Pusat, 10430, Indonesia

Paper received: 12-07-2024; revised: 04-12-2024; accepted: 24-12-2024; published: 30-04-2025

How to cite (APA Style): Roedy, R., Irwanto, B., & Taufik, R. M. (2025). Peran strategic thinking dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan mewujudkan kesejahteraan nasional sesuai amanat UUD 1945. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 8(1), 166-173. DOI: 10.17977/um022v8i12025p166-173

Abstract

Strategic thinking plays an important role in maintaining regional security stability and national welfare according to the 1945 Constitution. Indonesia plays a strategic role in multilateral diplomacy to face long-term challenges in Southeast Asia. This study uses a qualitative approach with a literature study method, analysing foreign policy and national security. The results show that strategic thinking contributes to regional stability through active diplomacy and maritime economic cooperation. The main findings include the concept of Indonesia's conceptual network in managing the South China Sea as an opportunity for economic cooperation. The novelty of this study lies in the integrative analysis of strategic thinking, diplomacy policy, and national welfare in the context of regional stability. With a data-based strategy and long-term vision, Indonesia can continue to play a role in global peace and prosperity.

Keywords: strategic thinking; stability; cooperation; security

Abstrak

Pemikiran strategis berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan kesejahteraan nasional sesuai UUD 1945. Indonesia memainkan peran strategis dalam diplomasi multilateral guna menghadapi tantangan jangka panjang di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Hasil menunjukkan bahwa pemikiran strategis berkontribusi terhadap stabilitas kawasan melalui diplomasi aktif dan kerja sama ekonomi maritim. Temuan utama mencakup konsep conceptual network Indonesia dalam mengelola Laut China Selatan sebagai peluang kerja sama ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pemikiran strategis, kebijakan diplomasi, dan kesejahteraan nasional dalam konteks stabilitas kawasan. Dengan strategi berbasis data dan visi jangka panjang, Indonesia dapat terus berperan dalam perdamaian dan kesejahteraan global.

Kata kunci: pemikiran strategis; stabilitas; kerjasama; keamanan

PENDAHULUAN

Strategic thinking atau pemikiran strategis mempunyai peran yang sangat vital bagi national leaders untuk melaksanakan tugasnya. Pemikiran strategis didefinisikan sebagai proses berpikir yang mencakup kemampuan untuk menganalisis berbagai aspek masa depan dengan

pendekatan kreatif dan kritis, serta kemampuan untuk menyusun kebijakan atau strategi yang berorientasi jangka panjang guna menghadapi tantangan yang kompleks. Menurut Liedtka (1998), *strategic thinking* berfokus pada kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan masa depan yang diinginkan, kemudian mengembangkan rencana yang inovatif untuk mencapainya, sembari memperhitungkan berbagai risiko dan peluang yang mungkin terjadi (Liedtka, 1998).

Pemikiran strategis atau *strategic thinking* dalam konteks pemerintahan adalah kemampuan untuk melihat tantangan jangka panjang, memprediksi berbagai kemungkinan, dan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional. Di Indonesia, peran pemikiran strategis sangat penting bagi pejabat negara dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial (UUD 1945, Alinea ke-4).

Di tengah situasi perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan dinamis, secara khusus di kawasan Laut China Selatan (LCS) saat ini terus mengalami konstelasi geopolitik yang melibatkan kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial di kawasan tersebut, namun RI dapat berkontribusi nyata untuk memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa ketegangan tersebut tidak berkembang menjadi konflik militer. Terkait dengan hal itu, menurut Sukma (2019) menekankan salah satu upaya Indonesia dalam kebijakan luar negerinya yaitu disamping mengedepankan dialog multilateral dan diplomasi aktif juga melalui penerapan pemikiran strategis. Melalui pemikiran strategis ini, Indonesia senantiasa bersikap wise dalam melihat dinamika yang terjadi sehingga kepentingan Nasional kita akan selalu terjaga. Artikel singkat ini membahas bagaimana pemikiran strategis diterapkan dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan mewujudkan kesejahteraan nasional yang terdiri dari tiga bagian; pertama *Strategic Thinking dan Kepentingan Nasional*, kedua, *Mewujudkan Kesejahteraan Nasional Melalui Pemikiran Strategis*, ketiga *Strategic Thinking dan Diplomasi*.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas peran pemikiran strategis dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri, kajian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan konsep *conceptual network* dalam analisis kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi celah dalam literatur yang belum secara eksplisit membahas bagaimana Indonesia dapat mengubah ketegangan geopolitik menjadi peluang kerja sama ekonomi melalui pemikiran strategis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan literatur akademik tetapi juga memberikan implikasi kebijakan yang lebih konkret.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemikiran strategis dapat diterapkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia guna menjaga stabilitas regional dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi peran diplomasi aktif, kerja sama ekonomi maritim, dan strategi kebijakan jangka panjang dalam menghadapi tantangan geopolitik yang berkembang. Dengan menyoroti relevansi pemikiran strategis dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pengambil keputusan dalam merancang strategi diplomasi yang lebih efektif.

Dalam struktur artikel ini, bagian pertama akan membahas konsep pemikiran strategis dan kepentingannya dalam kebijakan luar negeri. Bagian kedua akan mengulas penerapan pemikiran strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dengan fokus pada Laut China Selatan. Bagian terakhir akan membahas implikasi kebijakan dan rekomendasi strategis bagi pemerintah Indonesia guna meningkatkan efektivitas diplomasi dan kerja sama internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis peran pemikiran strategis dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Indonesia. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber akademik dan non-akademik yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta artikel berita dari sumber terpercaya.

Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kredibilitas dan relevansi terhadap topik penelitian. Hanya sumber yang memiliki validitas akademik tinggi dan berasal dari institusi yang diakui yang dimasukkan dalam analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, di mana data dikategorikan berdasarkan tema utama seperti diplomasi aktif, kebijakan luar negeri strategis, dan kerja sama ekonomi maritim.

Selain analisis literatur, penelitian ini juga meninjau beberapa studi kasus konkret mengenai penerapan pemikiran strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Misalnya, pendekatan Indonesia dalam menyikapi ketegangan di Laut China Selatan serta partisipasi aktif dalam ASEAN dan forum internasional lainnya. Studi kasus ini memberikan ilustrasi empiris yang memperkuat temuan penelitian dan menunjukkan bagaimana konsep pemikiran strategis diterapkan dalam praktik kebijakan luar negeri. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menyajikan kajian teoritis tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat menjadi landasan bagi rekomendasi kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran strategis berperan penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam mengelola dinamika geopolitik dan menjaga stabilitas kawasan. Namun, efektivitas kebijakan yang diterapkan masih perlu dianalisis lebih dalam dengan melihat dampak konkret terhadap kesejahteraan nasional. Selain itu, studi kasus mengenai kebijakan luar negeri Indonesia di Laut China Selatan menunjukkan bahwa meskipun diplomasi aktif telah diterapkan, hasilnya belum sepenuhnya optimal dalam meredakan ketegangan. Data statistik terbaru dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN, konflik teritorial masih menjadi isu yang belum terselesaikan secara tuntas. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan, Indonesia dapat mengambil pendekatan yang lebih proaktif dengan meningkatkan keterlibatan dalam inisiatif multilateral seperti ASEAN Maritime Forum dan kerja sama ekonomi berbasis sumber daya laut. Langkah ini dapat membantu Indonesia mengoptimalkan pemikiran strategisnya dalam konteks kebijakan luar negeri yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan nasional. Dengan memasukkan lebih banyak data empiris, analisis perbandingan, serta kajian mendalam terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti bagi pemerintah Indonesia.

Strategic Thinking dan Kepentingan Nasional

Menurut Mintzberg (1994), strategic thinking merupakan proses berpikir yang terstruktur, berbasis data, dan berorientasi masa depan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Dalam konteks pemerintahan, Mintzberg menambahkan bahwa pemikiran strategis tidak hanya terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia saja, tetapi juga kemampuan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan datang. Oleh karena itu, setiap pejabat negara diharapkan memiliki pemikiran strategis sehingga mampu

memproyeksikan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Di sisi lain, *strategic thinking* sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Kepentingan Nasional atau National Interest Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kepentingan Nasional Indonesia secara resmi sudah tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-4 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional yang mulia itu sangat bergantung kepada pejabat negara atau national leaders untuk menerapkannya secara konsisten sehingga kepentingan nasional yang mendasar seperti sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan harus selalu diprioritaskan oleh negara, termasuk ketersediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengedepankan perlindungan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik eksternal maupun internal dengan tetap berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas regional.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran strategis melibatkan kemampuan untuk memahami tantangan-tantangan domestik dan global yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional. Ini termasuk perubahan iklim, perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, serta masalah ekonomi global. Sebagai contoh, pemikiran strategis dalam mengatasi perubahan iklim melibatkan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon dan mengembangkan sumber energi terbarukan, yang tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi baru di masa depan (UNEP, 2019).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan domestik dan global, Indonesia membutuhkan pendekatan strategis yang terkoordinasi antara berbagai sektor pemerintahan. Penerapan pemikiran strategis dalam kebijakan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi pendidikan, menjadi landasan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dapat dicapai dalam jangka panjang (Hermawan, 2020). Dalam suatu artikel, kadang-kadang tidak bisa dihindari pengorganisasian penulisan hasil pengabdian ke dalam “anak subjudul”. Berikut ini adalah cara menuliskan format pengorganisasian tersebut, yang di dalamnya menunjukkan cara penulisan hal-hal khusus yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah artikel.

Mewujudkan Kesejahteraan Nasional melalui Pemikiran Strategis

Mewujudkan kesejahteraan nasional merupakan salah satu amanat utama dalam UUD 1945. Namun, pencapaian kesejahteraan ini tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan ekonomi jangka pendek. Dibutuhkan perencanaan strategis yang berkelanjutan dan terukur agar kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif. Oleh karenanya, *strategic thinking* akan berperan signifikan dalam proses pencapaian target bidang kesejahteraan nasional tersebut yang mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Salah satu contoh pemikiran strategis di bidang ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2014. Infrastruktur merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, membuka akses ke daerah-daerah terpencil, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Menurut Bank Dunia (2019), pembangunan infrastruktur yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2% per tahun, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Selain pembangunan infrastruktur, pemikiran strategis juga diperlukan dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap perubahan iklim, Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengembangkan sumber energi

terbarukan. Hal ini tidak hanya akan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru di sektor energi hijau (IEA, 2020).

Pemikiran strategis juga diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan industri di masa depan. Peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program reformasi pendidikan, termasuk pengembangan pendidikan vokasi guna meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja (Kemendikbud, 2020).

Penataan sistem kesehatan yang berkeadilan juga membutuhkan *strategic thinking* guna mencapai kesejahteraan nasional. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana sistem kesehatan yang lemah dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Investasi dalam kesehatan masyarakat termasuk pengembangan infrastruktur kesehatan dan pelatihan tenaga medis, harus menjadi prioritas dalam strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Menurut data Bank Dunia (2019) dalam beberapa tahun terakhir mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang pesat terutama dari sektor investasi, infrastruktur, termasuk pula dalam sektor transportasi dan energi. Hal ini tentu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya penerapan *strategic thinking* oleh para pemimpin Bangsa dan juga menunjukkan betapa pentingnya pemikiran strategis yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dan negarawan di Indonesia dalam mensukseskan pembangunan ekonomi bangsa yang berkelanjutan.

Strategic Thinking dan Diplomasi: Merubah Potensi Konflik menjadi Potensi Kerjasama

Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, pemikiran strategis dalam diplomasi internasional menjadi semakin penting. Bagi Indonesia, diplomasi adalah salah satu alat utama untuk menjaga stabilitas regional dan memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global. Indonesia, sebagai anggota pendiri ASEAN, terus berperan aktif dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN, G-20, dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Menurut Hermawan (2021), pendekatan diplomatik selalu bersandar pada pemikiran strategis yang diemban para pemangku kepentingan melalui kerjasama yang adil dan inklusif. Sebagai ilustrasi kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah dalam forum G-20 tahun 2022 lalu telah memperkuat posisi RI dalam percaturan ekonomi global, terutama dalam isu-isu seperti reformasi ekonomi dan perubahan iklim (Hermawan, 2021).

Dengan bekal pengalaman pada forum G-20 tersebut kiranya menjadi modalitas yang kuat bagi Indonesia untuk ikut membantu menyelesaikan berbagai isu atau konflik di forum internasional. Salah satunya adalah isu konflik di Laut China Selatan (LCS) yang saat ini terus menjadi trending topic di media pemberitaan. Terlebih lagi setelah kebijakan AS yang merestrukturisasi Komando AS di Asia Pasifik atau U.S. Pacific Command (US-Pacom) menjadi U.S. Indo-Pacific Command (US-IndoPacom) yang meliputi kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Oseania (Mulyadi, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Marsetio (2018), kebijakan AS ini juga semakin meningkatkan tensi antara China dan AS yang ingin saling menunjukkan hegemoninya di kawasan LCS. Konteks perebutan hegemoni di LCS yang dilakukan oleh AS dan China sangat berbeda, dimana AS melakukan pendekatan yang mengedepankan kekuatan militer (*military forces*), sedangkan China mengedepankan kekuatan non-militer (*smart forces*) dalam merealisasikan strategi Belt and Road Initiative (BRI) (Marsetio, 2018: 23).

Indonesia memandang kawasan LCS sebagai wilayah yang penting baik dari perspektif ekonomi, keamanan, maupun diplomasi. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan laut utama di mana sekitar 30% perdagangan dunia melintas. Konflik di kawasan ini yang melibatkan klaim teritorial oleh beberapa negara di ASEAN dan China, dapat memengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara serta mengancam kepentingan Indonesia, meskipun Indonesia tidak

terlibat langsung dalam sengketa tersebut. Berikut ini beberapa langkah dan upaya yang dapat ditempuh oleh Indonesia sebagai bagian dari konseptual framework guna merubah potensi konflik di LCS menjadi potensi kerjasama yang tentunya akan memberikan insentif positif tidak hanya bagi RI tapi juga kepada semua pihak yang terlibat.

Melalui Diplomasi Ekonomi Maritim

Salah satu kebijakan Nawa Cita Presiden Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (CSIS, 2015). Dengan kebijakan ini, Indonesia berusaha mendorong penggunaan Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan internasional yang aman dan terbuka bagi semua negara. Melalui diplomasi ekonomi maritim, Indonesia menawarkan konsep "Poros Maritim Dunia", yang bertujuan menjadikan perairan sekitar Indonesia sebagai pusat aktivitas ekonomi global. Indonesia mengajak negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk memanfaatkan Laut China Selatan sebagai kawasan perdagangan bebas, sambil tetap menjaga stabilitas keamanan. Menurut Wijaya, (2020) yang menulis dalam jurnal *The Indonesian Journal of Maritime Affairs*, melalui pendekatan diplomasi ekonomi maritim ini bertujuan untuk menciptakan interaksi yang lebih positif dan saling menguntungkan bagi semua negara-negara yang bertikai di kawasan LCS tersebut.

Menginisiasi Pengembangan Blue Economy

Menurut Nugraha (2019), kebijakan Indonesia perlu aktif mendorong konsep "Ekonomi Biru" di Laut China Selatan, yang melibatkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui kerja sama dalam bidang perikanan, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan laut, Indonesia berusaha mengalihkan fokus dari konflik teritorial menjadi pengelolaan ekonomi bersama. Dalam artikel dari *Jurnal Ocean and Coastal Management*, Nugraha menambahkan bahwa Indonesia telah memulai dialog dengan negara-negara ASEAN untuk mendorong kerja sama di bidang kelautan, yang diharapkan dapat meredam tensi konflik dan mendorong keuntungan ekonomi bersama (Nugraha, 2019).

Mewujudkan Kerja Sama Infrastruktur Maritim.

Melalui artikel di *Asian Economic Journal*, Halim (2020) menuliskan bahwa perlunya Indonesia memiliki inisiatif dalam bentuk Kerjasama infrastruktur maritim di Kawasan LCS. Dengan inisiatif ini diharapkan dapat meredam konflik dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan integrasi regional (Halim, 2020). Ditopang dengan strategic thinking yang mumpuni, Indonesia dapat memanfaatkan Laut China Selatan dengan mengembangkan peluang keberadaan infrastruktur maritim di sekitar kawasan LCS seperti pelabuhan dan jalur logistik. Melalui Belt and Road Initiative (BRI) yang diprakarsai Tiongkok, Indonesia mencoba memanfaatkan proyek infrastruktur ini untuk meningkatkan arus barang dan jasa. Indonesia juga mengajukan inisiatif ASEAN Connectivity yang diharapkan dapat menciptakan konektivitas ekonomi yang lebih baik di kawasan LCS.

Melakukan Promosi Pariwisata Bahari

Tidak diragukan lagi bahwa salah satu hasil strategic thinking dan diplomasi RI yang ditawarkan Indonesia di LCS adalah berupaya mendorong kerja sama di sektor pariwisata, khususnya pariwisata bahari, sebagai peluang ekonomi dari kawasan Laut China Selatan. Indonesia telah mendorong negara-negara di ASEAN untuk bersama-sama mengembangkan potensi wisata di kawasan ini dengan fokus pada keberlanjutan dan keamanan. Wulandari (2021) menggaris bawahi di dalam *Jurnal ASEAN Tourism Studies* bahwa Indonesia sebagai salah satu negara maritim terdepan di Asia Tenggara perlu mempromosikan pengembangan ekosistem pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di kawasan LCS sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi (Wulandari, 2021).

Laut China Selatan dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya energi, seperti minyak dan gas. Indonesia mengajukan kerja sama dalam eksplorasi energi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan tujuan menciptakan kerja sama lintas batas yang saling menguntungkan. Dalam sebuah penelitian dalam *Journal of Energy Policy*, Mahendra (2019) mengungkapkan bahwa Indonesia telah memulai inisiatif untuk mendorong perundingan tentang pemanfaatan sumber daya energi secara bersama-sama dengan negara-negara tetangga termasuk Tiongkok guna mengurangi ketegangan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan (Mahendra, 2019).

KESIMPULAN

Pemikiran strategis adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan mendorong kesejahteraan nasional. Dengan kebijakan luar negeri berbasis data dan berorientasi masa depan, Indonesia dapat berperan aktif dalam diplomasi multilateral dan menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik. Tantangan utama meliputi konsistensi kebijakan, koordinasi antar-lembaga, dan fleksibilitas dalam merespons perubahan global. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas analisis kebijakan, meningkatkan kerja sama internasional, dan mengoptimalkan sumber daya domestik untuk kebijakan luar negeri yang adaptif dan proaktif. Implikasi jangka panjang mencakup penguatan daya saing ekonomi, stabilitas politik, dan peningkatan peran Indonesia dalam organisasi internasional. Langkah strategis yang tepat dapat mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan memperkuat diplomasi ekonomi dan keamanan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak spesifik kebijakan strategis Indonesia di berbagai sektor dan melakukan studi komparatif dengan negara lain untuk wawasan lebih komprehensif. Perbaikan dalam pendekatan analitis, konsistensi bahasa akademik, dan pemaparan rekomendasi kebijakan yang lebih mendalam akan memberikan kontribusi signifikan dalam kajian pemikiran strategis dan kebijakan luar negeri Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2019). ASEAN's role in managing the South China Sea conflict: A diplomatic perspective. *Journal of Asian Studies*, 78(4), 765–787.
- Bank Dunia. (2019). *Indonesia infrastructure report: The path to sustainable growth*. Washington, DC: World Bank.
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (2015). *Jokowi's global maritime fulcrum: Ambition and constraints*. Jakarta: CSIS.
- Halim, S. (2020). ASEAN connectivity and Indonesia's role in economic integration in the South China Sea. *Asian Economic Journal*, 34(3), 234–249.
- Hermawan, Y. (2021). Indonesia's strategic role in the G20: Diplomacy and economic reform. *Journal of Global Economics*, 25(1), 33–45.
- International Energy Agency (IEA). (2020). *Energy policy review of Indonesia: Pathways for clean energy transition*. Paris: IEA.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Strategi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Pembangunan pertahanan nasional: Strategi jangka panjang*. Jakarta: Kemenhan RI.
- Liedtka, J. M. (1998). Strategic thinking: Can it be taught? *Long Range Planning*, 31(1), 120–129. [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(97\)00098-8](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(97)00098-8)
- Mahendra, I. (2019). Energy exploration and cross-border cooperation in the South China Sea: Indonesia's economic strategy. *Journal of Energy Policy*, 67(2), 55–72.
- Marsetio. (2018). *Perubahan tatanan geomaritim pasca pembentukan US Indopacific Command dan implikasinya terhadap konflik Laut China Selatan dalam perspektif Indonesia*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Mintzberg, H. (1994). *The rise and fall of strategic planning*. New York: Free Press.

- Mulyadi. (2019). Indonesia sebagai poros maritim dunia: Perspektif keamanan maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(1), Juni, Sesko TNI.
- Nasution, A. (2018). Building a long-term vision for national prosperity: Strategic planning in Indonesia. *Journal of Development Studies*, 27(3), 45–62.
- Nugraha, D. (2019). Blue economy: Indonesia's strategy in the South China Sea dispute. *Ocean & Coastal Management*, 182, 1–14.
- Sukma, R. (2019). Strategic diplomacy and Indonesia's role in Southeast Asia: Challenges and opportunities. *Journal of Southeast Asian Affairs*, 23(4), 345–370.
- Suryadinata, L. (2020). Indonesia's strategic diplomacy in the South China Sea: Maintaining balance in the region. *Southeast Asian Affairs*, 47(2), 121–145.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). *Green economy and climate change: A policy framework for sustainable development*. Nairobi: UNEP.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Wijaya, R. (2020). Maritime diplomacy and Indonesia's efforts to utilize the South China Sea for economic cooperation. *The Indonesian Journal of Maritime Affairs*, 12(2), 88–104.
- Wulandari, T. (2021). Promoting marine tourism cooperation in the South China Sea: Indonesia's role in ASEAN tourism. *ASEAN Tourism Studies*, 8(4), 65–78.